

Kesadaran Sejarah dan Supersemar

SAAT ini bangsa kita masih menyadari betapa pentingnya belajar dari sejarah bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena itu selalu muncul kekhawatiran apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sejarah. Kekhawatiran tersebut tidak hanya dirasakan para sejarawan saja, tetapi ancaman yang lebih besar lagi, yaitu hilangnya jejak masa depan bangsa.

Adapun makna kesadaran sejarah dalam kaitannya terhadap masa depan bangsa ialah semua kejadian di dalam sejarah itu mengandung pelajaran. Sehingga kita semua menjadi bijaksana setelah ada suatu peristiwa sejarah terjadi. Itu adalah logis dan terang. Kita bukan keledai yang akan tertumbuk dua kali kepada tiang dan batu yang sama. Tetapi, justru untuk bijaksana lebih dulu, sebelum peristiwa itu terjadi, itulah hikmah kearifan kesadaran sejarah.

Supersemar

Kesadaran sejarah Bangsa Indonesia tidak selamanya dihiasi oleh keberhasilan yang gilang-gemilang dan perjuangan suatu generasi tidak selamanya menghasilkan sukses besar. Sebaliknya mengingat pasang surutnya perjuangan sejarah bangsa kita memuat lembar-lembar yang diwarnai oleh tantangan, kelemahan bahkan juga kegagalan. Oleh karena itu, kita perlu berupaya agar Bangsa Indonesia tetap menjadi kuat dan sentosa. Untuk itu, kita mengambil pelajaran nilai dari masa lampau atau sejarah Bangsa Indonesia itu sendiri.

Tanggal 11 Maret 2019 ini kita diingatkan kembali peristiwa yang terjadi 53 tahun yang lalu, yakni lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Terlepas dari apakah Supersemar disewengkan atau tidak, sesungguhnya dengan Supersemar, Bangsa Indonesia telah diselamatkan dari kekuasaan komunis. Dengan Supersemar pula bangsa ini sudah menemukan kembali jejak masa depannya. Jalan Bangsa Indonesia menuju ke tujuan atau cita-cita bangsa mulai mencuat dalam berbagai kearifan bangsa.

Kearifan tersebut nampak sejak pergantian pemerintahan Soekarno ke Soeharto dan pergantian Pemerintahan Soeharto. Saat pergantian pemerintahan itu, terjadi konflik antara pendukung dan penentang. Namun akhirnya Pemerintahan Soekarno maupun Pemerintahan Soeharto bisa berakhir dengan damai, sebab para pendukungnya bisa menahan diri. Kearifan tersebut tercermin dalam sikap bijak yang dilakukan oleh sementara pimpinannya.

A Kardiyat Wiharyanto

Setelah Soeharto turun Bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 1999. Pemilu pertama zaman reformasi ini dibayangi kerusuhan sosial yang eskalatif yang dapat mengancam eksistensi bangsa. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena sebelumnya banyak terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA, sehingga partai-partai politik hanya akan menjual sentimen primordial. Jika demikian, maka pemilu akan berujung kerusuhan massal. Namun dugaan itu meleset, ternyata pemilu dapat terselenggara dengan baik. Hal ini tidak lepas dari sikap arif dan bijak dari para pemimpinnya.

Pemilu 1999 memunculkan PDI-P sebagai partai yang memperoleh kemenangan terbesar. Namun dalam SU MPR tahun 1999, ketua umum partai itu tidak memperoleh kedudukan presiden. Dalam situasi yang kritis, kekerasan dapat dihindarkan karena pihak yang kecewa bisa menahan diri demi keselamatan bangsa. Krisis politik juga terjadi sewaktu Sidang Istimewa MPR tahun 2001 yang memakzulkan Presiden Gus Dur. Konflik politik meningkat intensitasnya, pendukung dan lawan Gus Dur saling berhadap-hadapan, namun sidang berlangsung selamat, dan konflik komunal

dapat dihindarkan.

Kearifan Bangsa

Hal ini tidak lepas karena adanya kearifan bangsa. Hal senada juga terlihat sewaktu amandemen UUD 1945 maupun dalam kasus Ahok yang diwarnai krisis. Namun kearifan bangsa semakin bersinar dan para pemimpinnya mampu menahan diri demi keselamatan bangsa.

Dengan demikian sejak Supersemar kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terus berkembang dan membanggakan. Hal itu menunjukkan semakin dewasanya bangsa ini dalam berdemokrasi. Mudah-mudahan kesadaran tersebut terus semakin mantap dan dewasa sehingga akan memperlancar pencapaian cita-cita bangsa.

Demi kepentingan kita bersama, hendaknya para pemimpin jangan memanipulasi sejarah untuk kepentingan politik. Bila praktik-praktik seperti itu masih terus terjadi, maka langsung atau tidak langsung pembentukan masyarakat adil dan makmur akan terganjal. Hal ini disebabkan karena Indonesia berjalan tanpa arah. □ • e

*) *Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,*
Dosen Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.